

**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
URUSAN WAJIB.**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	100 %	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada 19 SOP	a. SOP ttg Surat Masuk b. SOP ttg Surat Keluar c. SOP ttg Pengajuan Cuti Pegawai d. SOP ttg Pengajuan Permintaan GU e. SOP ttg Penerbitan Surat Keterangan Miskin f. SOP ttg Legalitas Surat Akta Kelahiran g. SOP ttg Surat Keterangan Pindah Domisili h. SOP ttg Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN). i. SOP ttg Kenaikan Gaji BerProsedur Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Ada		

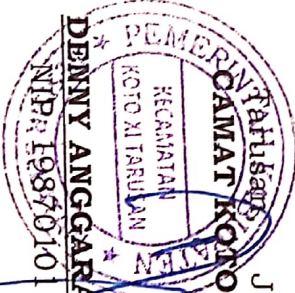
NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINER.
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIE	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	j. SOP tlg Pengurusan Rekomendasi Izin Tempat Usaha (SITU)HO. k. SOP tlg Pengurusan Rekomendasi Izin Keramaian l. SOP tlg Kenaikan Gaji Berkala m. SOP tlg Kenaikan Pangkat PNS n. SOP tlg Legalitas Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) o. SOP tlg Pengentrian Data Keuangan pasa SIPKD p. SOP tlg Penyusunan LAKIP q. SOP tlg Penyusunan LKPI r. SOP tlg Penyusunan LPPD	PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur	Tidak ada	0	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB	
4	PENGELOLAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten SKPD	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 28 personil		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.		0.26%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jabatan.		88%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yang terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Ada 4 jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA
					URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB	
	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKKPD	10	Jumlah Program RKKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada Renstra 100%	- Program RKKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam Renstra, sebanyak 12 Program		100%
	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.		100%
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.		100%
	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.539.012.780,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 532.044.469,-		99 %
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 26.800.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 26.559.000,-		99%
	Besaran belanja	15	Total Belanja	total belanja	- Total belanja pemeliharaan		0,52%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	pemeliharaan		pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- SKPD, sebesar Rp.15.200.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.512.212.780			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 15.200.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 532.044.469.		0,028%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbd: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK		Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKD) yaitu: Laporan Barang Milik Daerah yang terdiri dari: - Buku Inventaris - Rekapitulasi Daftar Mutasi - KIB A, B, C, D, E, F - KIR		Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- asset			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA
						URUSAN WAJIB	URUSAN WAJIB	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.565.808.810,65,- asset.		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	ada		Sangat puas


 Januari 2020
CAMAT KOTO XI TARUSAN
DENNY ANGARA SSTP,M.Ec.Dev
 NIP. 19870101 200602 1 001